

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada daerah kabupaten dan kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, disamping itu kebijakan desentralisasi memerlukan banyak faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya, selain itu terdapat faktor-faktor lain seperti kemampuan personalia di daerah dan kelembagaan pemerintah daerah (Riduansyah, 2003).

Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan mampu memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara wajar, efektif, dan efisien termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerjanya (Purnamasari, 2013).

Agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berkesinambungan dan tujuan pembangunan dapat dicapai, maka pemerintah daerah perlu menghimpun dana dari masyarakat melalui pajak dan retribusi daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya guna mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah (Soebechi dalam Purnamasari, 2013). Untuk itu, pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo perlu mengambil langkah-langkah kebijakan dengan meningkatkan penerimaan pendapatan daerah khususnya Pajak Daerah.

Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah (Riduansyah, 2003). Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahunnya meningkat, sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab dapat dilaksanakan (Baihaqi, 2011).

Berkaitan dengan penelitian ini bahwa salah satu pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah pungutan wajib atas

orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Prakosa, 2005: 2).

Pemungutan pajak merupakan alternatif yang paling potensial dalam meningkatkan pendapatan negara. Hal ini dikarenakan pajak memiliki jumlah yang relatif stabil. Selain itu, pajak daerah merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah untuk pembangunan adalah meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada di masing-masing daerah melalui pajak daerah.

Provinsi Gorontalo merupakan salah satu dari 6 provinsi yang ada di Sulawesi, yang didalamnya terdiri dari 6 kabupaten dan kota. Banyak potensi daerah yang bisa digali dari 6 kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo dan dari potensi yang ada tersebut dapat menghasilkan pemasukan yang cukup bagi PAD kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo, yakni diantaranya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah. Penerimaan pendapatan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Gorontalo masih didominasi dari sumber dana perimbangan yang terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK),

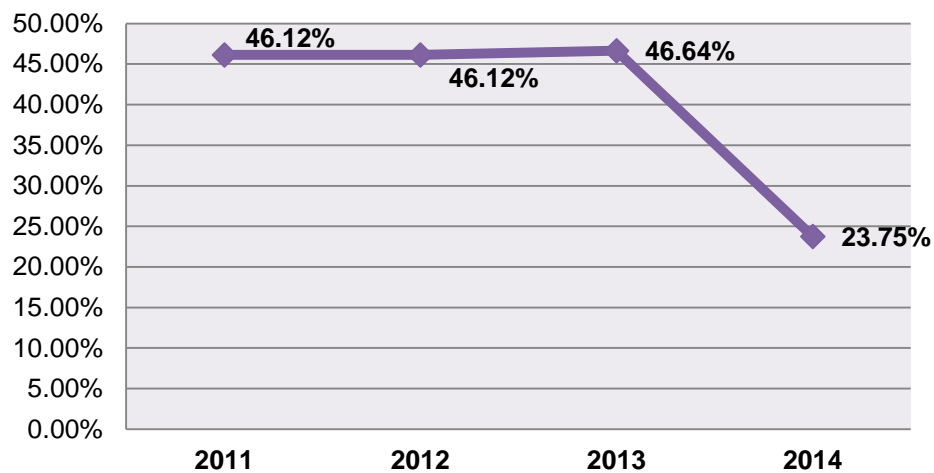
dan bagi hasil pajak dan bukan pajak (Ditjen Perimbangan Keuangan, 2014).

Sehubungan dengan hal di atas, yang menjadi tujuan dalam penyusunan Skripsi ini adalah menganalisa kondisi perekonomian kabupaten/kota yang ada di Provinsi Gorontalo, dimana sebagai daerah otonomi, setiap daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah, yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersumber dari PAD tersebut (Mulyadi, 2011).

Guna pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo perlu diciptakan berbagai upaya yang maksimal terhadap penggalan sumber-sumber penerimaan dan pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh daerah. Mengingat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 masih relatif kecil yaitu dengan rata-rata kontribusi sebesar 8,64% (Ditjen Perimbangan Keuangan, 2014).

Akan tetapi, sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 kontribusi PAD terhadap APBD mulai menunjukkan perubahan yang cukup signifikan, yaitu rata-rata kontribusinya mencapai 40,65%. Hal ini dapat dilihat dari grafik berikut ini :

Gambar 1.1 Kontribusi PAD terhadap APBD T.A 2011-2014



Sumber : Ditjen Perimbangan Keuangan (2014), diolah

Sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 kontribusi PAD terhadap APBD mulai menunjukkan perubahan yang cukup signifikan, yaitu untuk Tahun Anggaran 2011 porsi PAD memberikan kontribusi yang cukup signifikan yaitu sekitar 46,12% atau sejumlah Rp.75,07 Trilyun. Untuk Tahun Anggaran 2012 porsi PAD juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan yakni sekitar 46,12% atau sejumlah Rp.59,60 Trilyun. Untuk Tahun Anggaran 2013 porsi PAD memberikan kontribusi tertinggi sekitar 46,64% atau sejumlah Rp.92,45 Trilyun, dan untuk Tahun Anggaran 2014 porsi PAD memberikan kontribusi hanya mencapai 23,75% yakni sekitar Rp180,35 Trilyun. Rata-rata kontribusi PAD terhadap APBD adalah sebesar 40,65% (Ditjen Perimbangan Keuangan, 2014). Dengan demikian, ketergantungan setiap Provinsi terhadap dana perimbangan masih cukup dominan, walaupun peran PAD (*local taxing power*) relatif besar.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh Peneliti didapatkan bahwa sejak tahun 2010 sampai 2014 laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo mulai mengalami peningkatan. Sektor-sektor sumber PAD kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo diyakini oleh Peneliti jika lebih digenjot lagi, maka akan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Disisi lain berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pasar tentunya mengundang tanya apakah pajak daerah menjadi sumber utama untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah setelah pembatalan Retribusi Pasar di daerah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.

Diharapkan pajak daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang paling penting karena setiap tahunnya pajak daerah mampu memberikan sumbangan yang cukup besar bagi penerimaan daerah.

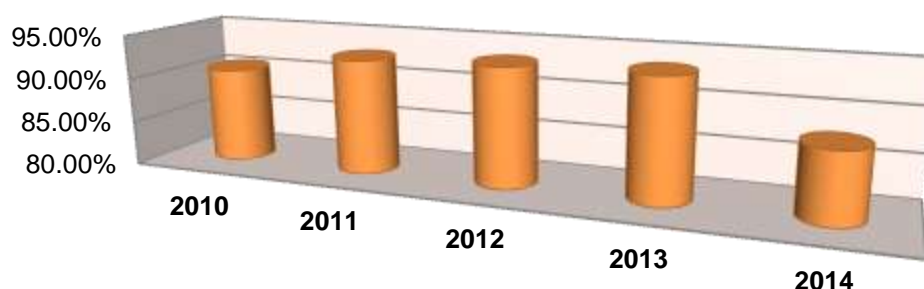
Kontribusi pajak daerah sangat diharapkan untuk menambah penerimaan Pendapatan Asli Daerah, sehingga daerah mampu melaksanakan otonomi yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan dalam rangka mencapai otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab (Purnamasari, 2013). Pemerintah harus lebih memperhatikan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak daerah dan menggali potensi-potensi pajak daerah

kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo, sehingga kepastian Pendapatan Asli Daerah lebih terjamin.

Tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung dengan cara menganalisis pendapatan daerah melalui laporan realisasinya. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berfungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah. Oleh karena itu, Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menjadi sentral informasi mengenai pajak daerah dan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya. Pajak daerah dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah dan dibayar sendiri oleh wajib pajak (Purnamasari, 2013).

Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo dapat dilihat dari grafik berikut ini :

Gambar 1.2 Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo T.A 2010-2014

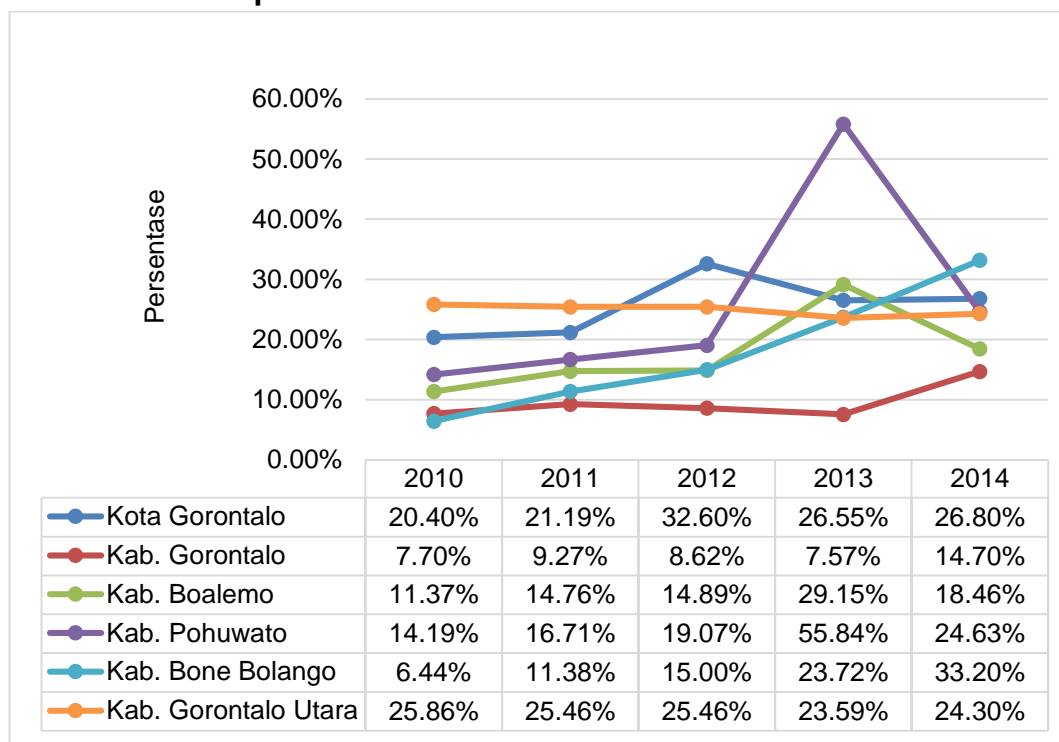


	2010	2011	2012	2013	2014
■ Porsi PAD	90.70%	92.92%	93.35%	93.60%	87.70%

Sumber : DPPKAD Provinsi Gorontalo (2014), diolah

Secara keseluruhan penerimaan Pajak Daerah dan perkembangan Realisasi PAD dari tahun anggaran 2010 sampai dengan 2014 terus menerus mengalami peningkatan yang signifikan. Untuk memudahkan pembacaannya, maka pemetaan dilakukan perdaerah (kabupaten/kota) selama 5 tahun (2010-2014) mengenai perkembangan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah. Perkembangan ini dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar 1.3 Penerimaan Pajak Daerah dan Perkembangan Realisasi PAD Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo TA. 2010-2014



Sumber : Ditjen Perimbangan Keuangan (2014), diolah

Berdasarkan fakta diatas, maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan memformulasikannya dalam judul “**Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diidentifikasi masalah yang berhubungan dengan efektivitas dan kontribusi pemungutan pajak daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, yakni :

1. Adanya ketergantungan setiap Kabupaten/Kota terhadap dana perimbangan yang masih cukup dominan, walaupun peran PAD (*local taxing power*) relatif besar;
2. Adanya fluktuasi penerimaan pajak daerah untuk tahun 2010-2014 yang berdampak pada perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan pokok yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah, diantaranya :

1. Bagaimana pengaruh tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo ?
2. Bagaimana pengaruh kontribusi pajak daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo ?
3. Bagaimana efektivitas dan kontribusi Pajak Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat efektivitas pemungutan Pajak Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo;
2. Untuk mengetahui pengaruh kontribusi Pajak Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo;
3. Untuk mengetahui apakah tingkat efektivitas dan kontribusi Pajak Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya bidang ilmu ekonomi akuntansi dalam menjembatani kesenjangan atau perbedaan antara teori dengan berbagai kenyataan dilapangan.
- b. Sebagai sarana untuk melatih mahasiswa dalam melakukan analisa keuangan khususnya perhitungan yang menggunakan analisa rasio.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah daerah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo untuk lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka membangun daerah yang maju dan berkualitas melalui Pajak Daerah;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca pada umumnya dan bagi mahasiswa pada khususnya, serta dapat memberikan motivasi kepada Peneliti selanjutnya untuk lebih meningkatkan wawasannya didalam melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang;
- c. Sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Strata 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo.